

**PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**SITI WULANDARI
NIM: 201710380211009**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Mei 2019**

PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diajukan oleh:

SITI WULANDARI
201710380211009

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Sabtu/13 Juli 2019**

Pembimbing Utama


Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D

Pembimbing Pendamping


Dr. Tongat, S.H., M.Hum



Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SITI WULANDARI

201710380211009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Selasa/28 Mei 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D
Sekretaris : Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum
Penguji II : Dr. Haris, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: **“Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat gelar S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan tesis ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian ini tidak terlepas dari jasa-jasa berbagai pihak, ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Zainul Arifin, Ibunda tercinta Romelah dan kedua adek tersayang Erna Dwi Setyowati dan Muhammad Sahril Musafak, serta untuk keluarga besar yang telah memberikan support dan doa demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah kado terindah dalam hidup penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program studi Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Akhsanul In'am, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing, mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Tata Usaha Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, atas pelayanan administrasi.
7. Keluarga besar Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Bripda Mohammad Hengki Kurniawan, S.H., atas bantuan, semangat dan ilmunya dalam melakukan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Nabilla Ayu Juniar, Novalia Kartika Dewi, Kurnia Puspitasari, Risalatul Mas'ula, Radhityas Sinta, Eliana Damayanti, Intan Khoirun Nisa', Zatwa Amelia, Ruchoyah, Mardiana, Nur Amalina Putri Adytia, atas semangat, support dan doanya.
11. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan tesis ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 22 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Daftar Penguji	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Surat Pernyataan	ix
Abstraksi	x
Abstract	xi
 Latar Belakang	 1
Rumusan Masalah	6
Tujuan Penulisan	6
Originalitas Penelitian	6
Kerangka Teori	
Tinjauan Umum Tentang Penahanan	8
Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	10
Tinjauan Umum Tentang Tersangka	10
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme	
Pengertian Tindak Pidana Terorisme	12
Karakteristik <i>Extra Ordinary Crime</i> dan <i>Serious Crime</i>	13
Asas-Asas Sistem Peradilan	15
Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	16
Metode Penulisan	
Metode Pendekatan	16
Jenis Bahan Hukum	
Bahan Hukum Primer	17
Bahan Hukum Sekunder	17
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
Teknik Analisis Bahan Hukum	18

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Pemikiran Perbedaan Masa Penahanan di Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Terorisme	18
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penambahan Masa atau Lama Penahanan Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Terorisme	26
Konsepsi Masa Penahanan di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme Agar Terpenuhi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	28

Penutup

Kesimpulan	34
Saran	35
Daftar Pustaka	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pasal Tindak Pidana Terorisme	33
--	----



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SITI WULANDARI**
NIM : **201710380211009**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Mei 2019

Yang menyatakan,


SITI WULANDARI

ABSTRAKSI

Nama : Siti Wulandari
NIM : 201710380211009
Email : ndari2406@gmail.com
Judul : Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Pembimbing : 1. Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D NIDN: 0017056501
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum NIDN: 0013016701

Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menimbulkan pro kontra, salah satunya terkait penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan yang awalnya 6 bulan menjadi 9 bulan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4). Hal tersebut sangat berlawanan dengan KUHAP Pasal 24 ayat (1) dan (2) bahwa untuk kepentingan penyidikan dilakukan penahanan selama 20 hari, dan diperpanjang 40 hari. Adanya penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan telah menciderai hak hukum dan peradilan tersangka dan juga menciderai asas-asas peradilan pidana yaitu asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui dasar penambahan waktu penahanan di tingkat penyidikan dan untuk mengetahui konsepsi penambahan di tingkat penyidikan yang tidak melanggar hak asasi tersangka. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan hanya untuk melindungi korban dan kepentingan penyidik saja, tetapi tidak dengan tersangka. Selama 2014-2015 terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan penyidikan. Padahal dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/ 2000, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, ICCPR, Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur dengan jelas bahwa tidak boleh melakukan kekerasan dalam proses penyidikan. Tindak pidana terorisme tidak semua termasuk *extra ordinary crime*, tetapi juga ada yang *serious crime*. Karena ketika dikatakan sebagai *extra ordinary crime* ada unsur yang tidak terpenuhi. Saran dengan adanya penelitian ini, pemerintah lebih memperhatikan lagi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan untuk aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan lebih mengutamakan hak asasi manusia. Perlu adanya pedoman khusus untuk aparat penegak hukum terkait tindak pidana terorisme dan monitoring.

Kata Kunci: Penahanan, Penyidikan, Tersangka Tindak Pidana Terorisme Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Name : Siti Wulandari
NIM : 201710380211009
Email : ndari2406@gmail.com
Title : Arrest Suspect Terrorism in Perspective Human rights
Advisors : 1. Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D NIDN: 0017056501
2. Dr. Tongat, S.H, M.Hum NIDN: 0013016701

The passing of Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, raises the pros and cons, one of which related to the addition period of detention at the level of investigation which was initially 6 months to 9 months as in Article 25 paragraph (2), (3) and (4) , It is so contrary to the Criminal Procedure Code Article 24 paragraph (1) and (2) that for the purpose of investigation of detention for 20 days, and extended 40 days. There is an additional period of detention at the level of investigation has injured the judicial and legal rights of suspects and also violates the principles of criminal justice is the principle of equality before the law, the presumption of innocence and the principle of justice quick, simple and inexpensive.

The purpose of this study, to determine the basis of additional detention time at the level of investigation and to determine the increase in the level of investigation conception that does not violate the rights of suspects. The research method that authors use the normative juridical approach, with data collection through library research.

Law No. 5 of 2018 was passed only to protect the interests of victims and investigators, but not by the suspect. During 2014-2015 there were 554 series of violence and human rights violations committed by the police in an investigation. Though the Chief of Police Decree No. Pol. Skep / 1205 / IX / 2000, the Police Regulation No. 8 of 2009, the ICCPR, the Law on Human Rights set clearly that there should be violence in the investigation process. Terrorism is not all inclusive extraordinary crime, but there are also serious crime. Because when regarded as extraordinary crime there are elements that are not fulfilled. Suggestions with their research, the government pay more attention Act Eradication of Terrorism and for law enforcement officers in the investigation pass prioritize human rights. There needs to be specific to the relevant law enforcement authorities and monitoring terrorism.

Keywords: Detention, Investigations, Terrorism Suspects, Human Rights

Latar Belakang

Sejak tahun 1981, Negara Indonesia mengalami berbagai serangan terror dalam skala besar. Oleh karena aksi teror tersebut mengakibatkan ratusan jiwa meninggal dunia dan luka-luka.¹ Indonesia pada tahun 2002 terjadi serangan teror di Bali. Dua ledakan besar terjadi di Paddy's Cafe dan Sari Club, korban tewas kurang lebih 200 orang, mayoritas korban yang tewas adalah warga negara asing berasal dari Australia yang sedang berwisata. Serangan teror tersebut tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah karena pulau Bali banyak dikunjungi wisatawan Internasional dan memiliki reputasi yang baik sebagai pulau yang aman untuk dikunjungi sebagai tempat wisata.²

Pasca serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, Polri sebagai institusi penegakan hukum langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis mulai mengamankan tempat kejadian perkara, membantu para korban ledakan bom, memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi saat kejadian dan mengumpulkan barang bukti sisa ledakan yang dianggap memberi petunjuk untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Mendapat serangan teror, pemerintah merespon dengan cepat. Presiden Indonesia langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut dibentuk karena situasi yang sangat mendesak dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tidak secara lengkap mengatur tindak pidana terorisme.³ Kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

¹ Wikipedia, *Terorisme di Indonesia*, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Terorismedi Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Terorismedi_Indonesia), diakses 10 Oktober 2018.

² Maulana Rahmat, *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 1 Nomor 2, September 2017, Hlm. 157.

³ *Ibid*, Hlm. 157-158.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Hamid Awaluddin berpendapat, aksi teror telah menjadi hal yang sangat serius untuk dihadapi. Terorisme, dalam apapun bentuknya dan motif yang melatarbelakangi dipandang sebagai sebuah gerakan yang menghancurkan kehidupan manusia dan martabat karena terorisme membunuh manusia secara masal tanpa memberi kesempatan pada korbannya untuk menyelamatkan diri. Terorisme menjadi kutukan karena aksinya telah membunuh manusia tanpa mengenal batas usia, gender, kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Di atas segalanya, aksi teror tidak mengenal perikemanusiaan, teritorial serta batas waktu.⁴

Berdasarkan asal usul lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2002, maka tragedi bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 menjadi fakta sosiologis dan yuridis bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Lahirnya Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Anti Terorisme telah menimbulkan pro dan kontra di antara berbagai pihak. Adapun beberapa alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang kontra terhadap aturan antara lain: 1) Undang-undang tersebut melanggar Hak Asasi Manusia karena diberlakukan surut (retroaktif), yang tidak diketahui pemberlakuannya sampai kapan; 2) Dibuat dalam suasana ketergesaan, sehingga terkesan sekedar menuruti kemauan pihak tertentu, bukan kebutuhan masyarakat; 3) Undang-undang terorisme merupakan wujud “reinkarnasi” dari Undang-Undang No. 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada lamanya waktu penangkapan dan penahanan yang melebihi batas sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP serta adanya kewenangan luar biasa kepada intelijen dalam memberikan laporan (bukti permulaan yang cukup); 4) Aksi teror masih dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum pidana umum yaitu KUHP dan KUHAP.⁵

⁴ Hamid Awaluddin, 2012, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, Hlm. 49-50.

⁵ Ali Masyhar, 2008, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 69.

Terorisme sekarang dipersepsikan sebagai sebuah gerakan HAM yang merupakan hak dasar pada diri manusia, sifatnya universal dan langgeng, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi bahkan dirampas oleh siapapun. Perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam waktu yang panjang. Di era modern ini hal tersebut masih berlangsung, dengan berbagai permasalahan yang muncul karena banyaknya penafsiran yang terkait di dalamnya.⁶

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun ciri-ciri Negara Hukum adalah: Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan bahkan kekuatan lain dan tidak memihak, Legalitas dalam segala bentuknya.

Macam-macam Hak Asasi Manusia, diantaranya: Hak Asasi Pribadi, Hak Asasi Ekonomi, Hak Asasi Politik, Hak Asasi Hukum, Hak Asasi Sosial dan Budaya dan Hak Asasi Peradilan. Tetapi dalam penerapannya terdapat problematika hukum, dimana tersangka tindak pidana terorisme tidak terpenuhi hak asasi hukum dan peradilannya. Karena dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4) bahwa *“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari, diperpanjang 60 hari dan 20 hari”*.

Pasal tersebut berpotensi tinggi terhadap pengabaian hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Penambahan waktu penahanan yang jauh berlebihan dari standar waktu yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu: *“Masa penahanan dalam Pasal KUHAP pada tahap*

⁶ Danur Vilano, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017, Hlm. 183.

penyidikan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 40 hari”.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyimpulkan bahwa penyebab kematian Siyono, terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Forensik Indonesia bersama Tim Dokter Forensik Muhammadiyah. Hasil autopsi menyebutkan jenazah mengalami patah pada lima iga bagian kiri, satu iga bagian kanan, tulang dada patah akibat benda tumpul, luka di kepala, serta memar di bagian tubuh belakang. Hasil autopsi berbeda dengan hasil visum yang dilakukan oleh Polisi. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigadir Jenderal Arthur Tampi, menyebutkan penyebab kematian Siyono karena kelelahan dan lemas setelah berkelahi dengan anggota Densus 88. Masyarakat tidak mempunyai kapasitas untuk menguji kebenaran hasil autopsi dan visum, namun masyarakat dapat menyimpulkan adanya kekerasan dalam kasus ini. Polisi juga mengakui ada kesalahan prosedur dalam pengawalan tersangka.⁷

Tersangka pencurian SH (35 tahun) diduga, disiksa oleh oknum penyidik Polres Gianyar saat proses interogasi yang dilakukan oleh 8 orang. SH mengalami luka lebam di dada akibat pukulan selang air dan sepatu, bahkan alat kelaminnya ditetesi plastik yang terbakar. Hal tersebut dilakukan, untuk memaksa SH mengaku telah menjambret di 17 TKP, karena tidak kuat SH terpaksa mengiyakan 2 TKP. Bahkan dalam melakukan penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan.⁸

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada 2008 mencatat 83,65% tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di wilayah Kepolisian Jakarta. Angka tersebut meningkat dari tahun 2005 yang tercatat 81,1%. Dari data tersebut 77% penyiksaan dilakukan untuk mendapat pengakuan oleh pelaku dengan bentuk penyiksaan, fisik 57,8%, psikis 71,4% dan seksual 30%.⁹ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan juga mencatat bahwa selama tahun 2014-2015 terdapat 554 kekerasan yang dilakukan oleh Polri. Tindakan yang paling dominan adalah penembakan sewenang-wenang

⁷ Redaksi Beritagar, *Polisi Harus Hentikan Kekerasan dalam Penyidikan*, dalam <https://www.google.com>, diakses pada 5 Mei 2019.

⁸ Prins David Saut, *Oknum Polisi di Bali Diduga Siksa Alat Vital Tersangka Pencurian*, dalam <https://news.detik.com>, diakses pada 16 Mei 2019.

⁹ Komaruddin Bagja Arjawinangun, *Kasus Kekerasan Terhadap Tersangka Saat Diperiksa Meningkat*, dalam <https://metro.sindonews.com>, diakses pada 16 Mei 2019.

sebanyak 272 peristiwa. Kekerasan tidak hanya terjadi pada tindak pidana terorisme, melainkan juga pada tindak pidana lain.¹⁰

Hal tersebut tidak hanya melanggar hak tersangka dalam suatu peradilan yang cepat dan sederhana dan juga asas praduga tak bersalah. Tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, diantaranya: hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum. Penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik tidak hanya berdampak pada luka, melainkan juga berdampak pada kematian. Banyak pihak yang merasa dirugikan, salah satunya adalah keluarga, bahkan ketika pelaku belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sah bersalah.

Upaya pemberantasan dalam hal tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah telah cukup memuaskan. Dalam Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 bahwa penambahan waktu penahanan di tingkat penyidikan yang paling lama dilakukan 6 bulan (4 bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan). Hal ini masih dirasakan kurang memadai bagi penyidik untuk mengungkap jaringan skala yang luas baik Nasional, Regional maupun Internasional. Karena terorisme yang menurut masyarakat luas tau bahwa dia tergolong dalam *extra ordinary crime*, yang dilakukan secara terorganisir. Sedangkan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia sebatas permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan penjatuhan pidana dalam putusan hakim sebagian besar di bawah 10 tahun pidana penjara. Penambahan waktu penahanan di tingkat penyidikan lebih tepat diterapkan dalam pendanaan terorisme, karena hal tersebut merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

¹⁰ Kiagus Aulianshah, *Polisi Harus Hentikan Kekerasan Dalam Penyidikan*, dalam <https://beritagar.id>, diakses pada 16 Mei 2019.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Apakah yang menjadi pemikiran perbedaan masa penahanan di tingkat penyidikan dalam tindak pidana terorisme?
2. Apakah penambahan masa atau lama penahanan dalam penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana konsepsi masa penahanan di tingkat penyidikan terhadap tersangka tindak pidana terorisme agar terpenuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran perbedaan masa penahanan di tingkat penyidikan dalam tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui penambahan waktu atau lama penahanan dalam penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
3. Untuk mengetahui konsepsi masa penahanan di tingkat penyidikan terhadap tersangka tindak pidana terorisme agar terpenuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Originalitas Penelitian

Untuk mengetahui originalitas/keaslian penelitian, untuk itu penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan, sehingga mengetahui kekurangan maupun kelebihan penelitian tersebut. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Judul	Jurnal	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Tirta Mulya W. P, dan Khoiril Huda Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Tipiter) dalam Perlindungan HAM	<i>Lex Scientia Law Review</i> , Volume 1 Nomor 1, November 2017	1. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam penanganan pelaku tipiter? 2. Bagaimana proses penanganan kembali bagi korban terorisme di Indonesia?	KUHAP telah merumuskan hak bagi tersangka/terdakwa untuk melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 s/d 68 KUHAP. Namun dalam penerapannya, kepedulian pada tersangka/terdakwa sering tidak dihiraukan oleh aparat penegak hukum.
2	Danur Vilano Perlindungan Hak Tersangka Tindak Pidana Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocent</i>) Dalam Sistem Peradilan Pidana	<i>e Jurnal Katalogis</i> , Volume 5 No. 3, Maret 2017	1. Bagaimana formulasi kebijakan dalam melindungi hak-hak tersangka tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana? 2. Bagaimana formulasi kebijakan tentang prosedur penanganan tersangka tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana?	Formulasi kebijakan perlindungan hak tersangka tindak pidana terorisme secara normatif telah diatur dalam KUHAP dan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3	Sujasmin Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiel Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Wawasan Yuridika, Volume 1 Nomor 1, Maret 2017	Sejauh mana penetapan aspek hukum pidana materiel dalam RUU Pemberantasan Tipiter?	Pemberantasan Tipiter mempunyai sifat berdiri sendiri, dengan Sistem Pidana dan Pemidanaan yang lainnya, mulai ditetapkan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda dengan

				ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus dari pidana penjara, serta penetapan sanksi pidana bersifat alternatif.
4	Einstein M. Yehosua Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003	<i>Lex Crimen</i> , Volume 1 Nomor 4, Oktober-Desember 2012	1. Bagaimanakah kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus Tindak pidana terorisme di Indonesia? 2. Bagaimanakah Prosedur Penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?	Dalam Prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme ini sesuai dengan UU No.15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara yang diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Baik dari pihak TNI, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara dalam rangka proses penyelidikan dan penangkapan yang sama-sama mendukung kelancaran dari pada proses penyidikan yang akan digelar nanti.

Beberapa penelitian terdahulu di atas secara garis besar membahas tentang tindak pidana terorisme. Tetapi yang membedakan dengan penelitian saya, membahas terkait penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang banyak menimbulkan pelanggaran HAM terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

Kerangka Teori

Tinjauan Umum Tentang Penahanan

Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim (Pasal 20 KUHAP). Alasan dilakukannya penahanan meliputi alasan subjektif dan objektif. Yang termasuk dalam alasan subjektif adalah sebagai berikut:

- a. Tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa ditakutkan akan melarikan diri; atau
- c. Merusak bahkan menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan surat perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh hakim menggunakan surat penetapan penahanan.

Mengenai lama waktu penahanan, KUHAP membedakan antara dalam tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Penuntut umum dapat menahan terdakwa paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hakim Pengadilan Negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari. Hakim Pengadilan Tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari. Hakim Mahkamah Agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 (lima puluh) hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28.¹¹

Sedangkan penahanan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

- (1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.

¹¹ Edy Sunaryo Berutu, *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, Lex Crimen*, Volume VI Nomor 6, Agustus 2017, Hlm. 86-87.

- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Dalam menentukan tindak pidana serta pelakunya tindak pidana, untuk itu terdapat proses penyidikan. Dimana proses penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penyidik dalam menemukan serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut dapat menentukan suatu tindak pidana serta menentukan pelaku tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.¹²

Penyidik diatur dalam Pasal 1 butir kedua Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Penyidik adalah seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (dalam hal ini adalah Polri) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan (misalnya dalam hal perpajakan, lingkungan hidup, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tinjauan Umum Tentang Tersangka

Berbicara mengenai hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

- a. Hak tersangka/terdakwa segera mendapat pemeriksaan

¹² Adriyanto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Volume 2 Edisi 2, Tahun 2014, Hlm. 2.

Penjabaran pada prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- 1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
- 2) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
- 3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan.

b. Hak untuk melakukan pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka/terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, diantaranya:

- 1) Tersangka mempunyai hak untuk mengetahui terkait apa yang disangkakan dengan bahasa yang dapat dan mudah dimengerti.
- 2) Hak untuk diberitahu dilakukan pada awal dimulainya pemeriksaan kepada tersangka.
- 3) Terdakwa mempunyai hak untuk mengetahui apa yang didakwakan kepadanya dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
- 4) Berhak didampingi oleh Juru Bahasa
Didampingi oleh Juru Bahasa berlaku pada setiap tingkat, baik dalam tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.
- 5) Mempunyai hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum

Dalam Pasal 55 masih terjadi diskriminatif dalam penerapannya.

c. Dalam tahanan tersangka atau terdakwa juga mempunyai hak

Hak-hak tersebut pada umumnya adalah hak dalam penahanan maupun di luar penahanan, mulai proses penyidikan sampai pemeriksaan pada proses persidangan.

d. Terdakwa mempunyai hak dalam proses pemeriksaan di muka persidangan

- 1) Terdakwa berhak untuk diadili pada sidang yang terbuka untuk umum, serta

- 2) Berhak untuk membuktikan di muka persidangan dengan mengajukan saksi-saksi atau ahli.
- e. Terdakwa juga mempunyai hak untuk memanfaatkan upaya hukum
Terdakwa setelah dijatuhi hukuman dalam putusan pengadilan, apabila tidak setuju dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum seperti: Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
- f. Hak dalam menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada terdakwa dalam menuntut ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan bahkan penyitaan dilakukan secara tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak terbukti.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme

Ketika definisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta berarti meniadakan definisi hukum tentang terorisme itu. Menurut hukum nasional masing-masing negara, di samping bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum. *Nullum crimen sine poena*, begitu bunyi sebuah asas hukum tua, yang bermakna bahwa tiada kejahatan yang boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hukuman, tetapi karena faktanya kini terorisme sudah bukan lagi sekadar *International Crime* dan sudah menjadi *Internationally Organized Crime*.

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata *teror* juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan

terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 1 angka 2 bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Hal itulah yang mendasari penempatan terorisme sebagai “*kejahatan yang tergolong istimewa/luar biasa*” (*extra ordinary crime*). Penempatan demikian ini logis, mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban tidak berdosa yang jumlahnya tidak sedikit.¹⁴

Karakteristik *Extra Ordinary Crime* dan *Serious Crime*

Extra Ordinary Crimes dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan luar biasa, disini adalah pelanggaran HAM berat. *Extra ordinary crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati secara internasional sebagai pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court* dan Statuta Roma, mendapatkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tersebut. Yang termasuk dalam *Extra ordinary crimes* yaitu kejahatan genosida

¹³ Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 21-22.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 58-59.

kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Secara umum, tindakan-tindakan terorisme merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat politik, kelompok-kelompok teroris menggunakan teror sebagai alat atau cara untuk meraih tujuan-tujuan yang sifatnya politik dan bukan untuk memperoleh keuntungan materi. Banyak para ahli yang memperdebatkan apakah terorisme merupakan kejahatan atau peperangan. Meskipun tindakan terorisme sering dilakukan dengan cara membunuh, merusak properti dan sebagainya, akan tetapi kejahatan terorisme memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar kejahatan jalanan atau kejahatan yang terorganisir. Sama halnya ketika negara-negara menggunakan “peperangan” (*warfare*) sebagai metode untuk mewujudkan hal hal yang bersifat politik, maka kelompok teroris menggunakan tindakan-tindakan terorisme dengan cara kekerasan untuk mengintimidasi atau menimbulkan rasa takut bagi orang banyak untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat politis.¹⁵

Extra Ordinary Crimes memiliki karakteristik yaitu:¹⁶

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan keji dan kejam, yang mengguncang hati nurani manusia.
2. Mengancam perdamaian serta keamanan internasional.
3. Adanya unsur sengaja, terorganisir, sistematis serta meluas dan menimbulkan kematian atau akibat-akibat lainnya yang serius.
4. Akibat yang ditimbulkan sangat serius bagi negara atau masyarakat luas, seperti halnya: mengganggu ketertiban umum, mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar seperti kejahatan ekonomi.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindak pidana pencurian

¹⁵ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai “Extraordinary Crime” Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Magister Hukum, Universitas Medan Area, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Volume 5 Nomor 5, Oktober 2017, Hlm. 94.

¹⁶ Sefriani, *Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012)*, Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 2, Agustus 2013, Hlm. 100.

dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang termasuk sebagai *serious crime*. Mahkamah Konstitusi menyamakan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana narkoba. Hal tersebut karena pencurian dengan kekerasan menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat. Oleh karena itu perbuatan jahatnya menimbulkan akibat psikologis yang sama. Ancaman pidana terhadap kedua tindak pidana tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta dapat mencegah agar kejahatan tidak terjadi lagi.

Berdasarkan kasus tersebut, pihak yang merasa dirugikan mengajukan *judicial review*. Tetapi MK menolak menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum pidana di Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pelaku terbukti secara sah mencuri dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya pada korban. Mahkamah Konstitusi berpendapat hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya hak hidup yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak melanggar Pasal 28A dan juga Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Hak asasi dalam dua pasal tersebut dibatasi oleh Pasal 28J UUD NRI 1945. Sebagaimana diketahui Pasal 28J UUD NRI 1945 berbunyi adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

¹⁷ *Ibid*, 96.

Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana

Sedangkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun (*Equality before the law*)¹⁹
2. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)
4. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi
5. Hak memperoleh bantuan hukum
6. Hak kehadiran di muka pengadilan
7. Peradilan yang terbuka untuk umum
8. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)²⁰
9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan pendakwa terhadapnya
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya²¹

Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Putra Abardin, Hlm. 42.

¹⁹ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 85.

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, Hlm. 74.

²¹ *Ibid*, Hlm. 75.

tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.²²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang HAM) sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dianggap cukup. Undang-Undang HAM mengatur lebih rinci tentang peninjauan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dilindungi oleh setiap orang, negara, hukum dan pemerintah.

Metode Penulisan

Metode Pendekatan

Dalam melakukan peneliiian ini menggunakan pendekatan masalah, yaitu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian.²³ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara menelaah hal yang bersifat teoritis mengenai asas, konsep dan norma berkaitan dengan “Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Pendekatan yuridis normatif disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.²⁴

²² Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, Hlm. 11.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 112.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 52.

Jenis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan bahan hukum, diantaranya:

Bahan Hukum Primer²⁵

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari melakukan studi kepustakaan, dalam mengkaji jurnal, buku, makalah, draf rancangan peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim, Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Mulia, Hlm. 41. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang *Autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan Majelis Hakim.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menemukan bahan hukum yang dipakai untuk melakukan penelitian ini, diperlukan teknik pengumpulannya yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,²⁶ kemudian hasil tersebut dikaji dan disusun secara sistematis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini, dilakukan setelah ditemukan data-data yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan memilih teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal yang berkaitan dengan “Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, yang dituangkan dalam bentuk deskriptif, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya atau teorinya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Pemikiran Perbedaan Masa Penahanan di Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Terorisme

Naskah Akademik dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, poin penangkapan dan penahanan menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman proses penyidikan kasus tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara biasa seperti melakukan penyidikan dalam tindak pidana umum, seperti: pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Penyidik memanfaatkan laporan intelijen sebagai salah satu bahan yang dijadikan bukti permulaan, penerapan masa penangkapan dan penahanan.

²⁶ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hlm. 392.

Laporan Intelijen harus dimanfaatkan oleh penyidik untuk dijadikan bukti permulaan dalam melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 *“Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan”*. Pasal 28 *“Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 jam”*. Sebagaimana isi pasal tersebut, dirasa masih kurang dalam mengakomodir bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya mengungkap jaringan terorisme, sampai skala yang luas. Berikut beberapa kasus tindak pidana terorisme:

a. Bom Bali I pada tahun 2003 dengan berkas No. Pol. BP/60/IV/2003/Satgas, tertanggal 24 April 2003

Tersangka dalam aksi tersebut adalah Ali Imron yang mendapat hukuman seumur hidup. Tersangka ditangkap di Pulau Tanjung Barukang, Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana untuk mencapai pulau tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih dua puluh hari untuk dibawa ke Polda Bali yang harus melewati Balikpapan-Samarinda dengan menyusuri Sungai Mahakam, kemudian menggunakan *speedboard* untuk menuju ke Tanjung Barukang

b. Tersangka kasus teror kerusuhan di Poso Nomor Berkas Perkara No. Pol. BP/01/VII/2008/Densus dan BP/02/VII/2008

Tersangka kasus tersebut adalah Dr. Agus Purwanto dan Abu Husna yang tertangkap di Malaysia, karena faktor geografis tersebut serta yuridiksi maka proses penangkapan membutuhkan waktu yang tidak sedikit yaitu kurang lebih 10 hari.

Begitu pula dalam kasus terorisme yang lain, dimana penahanan di tingkat penyidikan, secara kuantitas tersangka atau pelaku tindak pidana terorisme dilakukan lebih dari satu orang dengan peran yang berbeda tetapi tujuan sama. Terkait kelompok atau jaringan tersebut maka perlu strategi

penyidikan yang tepat dikarenakan dalam setiap kasus yang terungkap banyak tersangka yang tidak menutup kemungkinan para tersangka terposisikan sebagai saksi (mahkota). Naskah Akademik dalam Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang menjadi landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis adalah:

a. Landasan Filosofis

Dalam membuat naskah akademik, diperlukan landasan filosofis yang artinya pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Nilai-nilai pancasila yang mencerminkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam pembukaan terdapat rumusan pancasila, yang terdapat pada alinea keempat. Alinea keempat memuat tujuan Negara dan dasar Negara, yang pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar Negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan alinea tersebut perlu adanya suatu pengaturan yang adil bagi pelaku dan korban. Demi terwujudnya ketertiban bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar terhindar dari terorisme. Karena terorisme dianggap telah meresahkan masyarakat luas, dan aksi terorisme tidak pernah ada habisnya. Untuk itu perlu adanya pengaturan baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Landasan Yuridis

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tertanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini disahkan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara khusus serta kurang mengakomodir dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berbicara politik hukum, kejahatan modern yang terjadi di seluruh dunia telah mempengaruhi pemerintah. Hal ini Pemerintah

lakukan dengan memberlakukan undang-undang yang bersifat khusus, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Tindak Pidana Perbankan.

Di samping itu Indonesia sejak tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi 6 Konvensi Internasional dari keseluruhan 12 konvensi yang terkait terorisme, antara lain:

- a. *The 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist bombing* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006);
- b. *The 1999 International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006);
- c. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963* (Konvensi Internasional Tindak Pidana dan Perbuatan-Perbuatan tertentu yang Dilakukan di dalam Pesawat Udara);
- d. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970* (Konvensi Tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara secara Melawan Hukum)
- e. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Againsts the Safety of Civil Aviation 1971* (Konvensi Tentang Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil);
- f. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1979* (Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir).

c. Landasan Sosiologis

Sepanjang tahun 2000-2009, Indonesia tercatat telah terjadi 22 kali pengeboman dari skala kecil sampai skala besar.. Pada tanggal 17 Juli 2009 telah terjadi peledakan di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada Jum'at pagi, dengan menewaskan

korban 9 orang dan luka-luka 55 orang. Ledakan bom di Kompleks Perguruan Cikini pada tahun 1962 dalam upaya pembunuhan Presiden Ir. Soekarno, yang berlanjut pada Agustus 2001 di Plaza Atrium, Senen, Jakarta yang mengakibatkan enam orang luka-luka. Semua aksi pengeboman sepanjang tahun tersebut telah menjadi isu dalam Negeri.

Pada tahun 2018 terjadi lima pengeboman yang terjadi di beberapa daerah, diantaranya: *Kesatu*, Teror Bom di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Kerusuhan terjadi antara pihak Kepolisian di Komplek Brimob dengan narapidana teroris. Dalam kejadian tersebut, enam anggota polisi dijadikan Sandra. Lima diantaranya meninggal. Satu tahanan teroris juga meninggal atas kejadian tersebut. Pasca kejadian tersebut, 145 narapidana teroris dipindahkan dari Mako Brimob ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Kedua, Bom di 3 Gereja Surabaya. Pada Minggu, 13 Mei 2018 telah terjadi pengeboman di 3 Gereja yang pelakunya diketahui merupakan satu keluarga. Bom diledakkan di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro dan Gereja Pentakosta Jalan Arjuna. Pelaku merupakan anggota dari kelompok JAD itu tewas dalam melakukan aksinya. Dalam aksinya pelaku mengajak 3 anaknya, yang dua tewas. Peristiwa tersebut juga menewaskan warga gereja, Aloysius Bayu, yang dengan berani menghalangi motor yang digunakan pelaku memasuki wilayah Gereja Santa Maria Tak Bercela.

Ketiga, Bom di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Terjadi pada tanggal 13 Mei 2018, bom tersebut meledak karena pelaku tidak sengaja meledakkan bom rakitannya. Pelaku terror bom merupakan satu keluarga yang masih memiliki hubungan dengan keluarga pelaku terror bom 3 Gereja di Surabaya. Dalam insiden ini tiga orang tewas yang merupakan ayah, ibu dan anak sulung mereka. Tiga anak lainnya mengalami luka dan selanjutnya dilakukan pendampingan oleh KPAI bekerja sama dengan PPA Jawa Timur.

Keempat, Bom Polrestabes Surabaya, tanggal 14 Mei 2018. Sehari setelah kejadian ledakan teror bom di 3 Gereja. Teror kembali

dilakukan oleh satu keluarga. Sepasang suami istri dan 3 anaknya mendatangi Polrestabes Surabaya dengan menggunakan dua sepeda motor. Saat masih berada di palang gerbang masuk, bom meledak. Empat dari lima pelaku teror tewas di tempat. Empat polisi dan enam warga sipil juga menjadi korban teror tersebut.

Kelima, Penyerangan Terduga Teroris di Mapolda Riau. Tepat sehari sebelum bulan Ramadhan dimulai, Selasa 16 Mei 2018, Polda Riau juga diserang oleh sekawanan orang yang diduga tergabung dalam kelompok terorisme. Kawanan ini terdiri dari lima orang dengan menggunakan mobil Avanza putih. Pada pukul 09.00 mobil diketahui mendesak masuk ke dalam Mapolda Riau dan dihalangi pihak Kepolisian. Empat orang pelaku turun dari mobil dan melakukan penyerangan dengan menggunakan samurai. Seorang pelaku sempat berusaha kabur, sehingga seorang polisi gugur dalam aksi tersebut karena ditabrak pelaku yang kabur. Empat orang pelaku lainnya tewas tertembak polisi. Dua wartawan dikabarkan turut terluka.²⁷

Pada awal 2019 juga terjadi bom bunuh diri di kawasan Jalan Cenderawasih, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Ledakan bersumber dari rumah terduga Husain atau Abu Hamzah alias Upang (32 tahun). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tetapi istri dan anak pelaku tewas saat melakukan aksinya.²⁸ Berdasarkan banyaknya kasus tersebut yang di sepanjang tahun, menjadikan aksi terorisme di Indonesia semakin merejalela. Perlu adanya payung hukum untuk mengatasi hal tersebut, agar para pelaku jera dan tidak terjadi lagi aksi terorisme.

Pengaturan yang ada saat ini dianggap kurang untuk mengatasi masalah terorisme yang berkaitan erat dengan “jaringan”. Sejak pengeboman yang terjadi di WTC, dilakukan amandemen terhadap undang-undang terorisme atau apapun penyebutannya dalam negara

²⁷ Margith Juita Damanik, *5 Kasus Teror di Indonesia Selama Mei 2018*, dalam <http://www.google.com>, IDN Times, diakses pada 12 April 2019.

²⁸ Tribun Medan, *Kesaksian Warga Bom Bunuh Diri Ibu dan Bayi 2 Tahun Suaranya Kuat Kali, Ini Kronologi Teror Sibolga*, dalam <http://wartakota.tribunnews.com>, diakses pada 12 April 2019.

tersebut. Oleh karena itu, diusulkan diperpanjang terhadap masa penangkapan dan penahanan. Sementara, masalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Naskah Akademik dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 berkaitan dengan lamanya masa penahanan ini dalam mengungkapkan jaringan. Jaringan diyakini selalu menjadi pola kerja pelaku tindak pidana terorisme.

Masa penangkapan tujuh hari tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang cukup luas dan geografis negara lain, dimana tindak pidana terorisme termasuk *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa). Sehingga masa penangkapan pada tindak pidana terorisme diusulkan diperpanjang dari tujuh hari menjadi tiga puluh hari. Hal tersebut juga dirasa kurang memadai dalam hal penahanan yang hanya 180 hari, karena penyidik bekerja secara tergesa-gesa. Sehingga diusulkan perpanjangan menjadi 270 hari, karena tindak pidana terorisme berbentuk jaringan. Butuh waktu untuk mencari bukti berkaitan dengan kelompok.²⁹

Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dirasa masih kurang melindungi hak-hak dari semua pihak, dalam hal ini korban dan pelaku. Undang-undang tersebut hanya untuk kepentingan korban dan penegak hukum saja. Sedangkan salah satu dari ciri peraturan perundang-undangan yang baik adalah isi peraturannya mengikat secara umum, artinya peraturan tersebut tidak hanya tertuju dan mengikat orang atau golongan tertentu.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penambahan Masa atau Lama Penahanan Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara otomatis juga sebagai pertanda bahwa penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan semula dari 6 bulan menjadi 9 bulan. Hal tersebut dirasa telah melanggar hak asasi hukum dan peradilan tersangka. Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di muka umum. Dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum ada putusan hakim.

²⁹ Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Asas praduga tidak bersalah yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Realisasi penerapan asas praduga tak bersalah terjadi problematik, berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Penggunaan cara kekerasan dalam proses pemidanaan oleh polisi sebagaimana juga dikemukakan oleh Rahardjo, dalam penelitiannya bahwa polisi masih sering menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atas keterangan dari tersangka, membuat asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana sangat diutamakan dibanding dengan perkara lainnya. Agar hak asasi tersangka terpenuhi dan tidak dilanggar.³⁰

Sejarah perkembangan politik di Indonesia, menunjukkan bahwa praktek penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sering berujung kepada penyiksaan, perampasan kehormatan bahkan penghilangan nyawa demi kepentingan politik yang sedang berkuasa. Hak-hak tersangka yang sudah ditentukan dalam undang-undang, baru diberikan setelah didapat pengakuan, yang seharusnya diberikan pada awal penyidikan berlangsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, bahwa penegakan hukum yang baik tidak hanya dilandasi faktor hukum (undang-undang) yang baik dan lengkap, melainkan juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, fasilitas dan budaya hukum masyarakat.

Hal tersebut juga melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut tidak kalah penting dari asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

³⁰ E. Nurhaini Butarbutar, *Asas Praduga Tidak Bersalah Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 No. 3, September 2011, Hlm. 472-473.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dijangkau oleh masyarakat. Namun, tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.³¹

Meskipun di dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi dalam prakteknya terdapat halangan dan hambatan. Misalnya dalam kasus tindak pidana terorisme, bahwa tersangka mempunyai hak untuk segera diadili dalam proses persidangan. Sedangkan yang kita ketahui, bertambahnya masa penahanan di tingkat penyidikan yang menjadi 9 bulan menghambat tersangka untuk diajukan ke tingkat selanjutnya yaitu penuntutan.

Konsepsi Masa Penahanan di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme Agar Terpenuhi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Perpanjangan masa penahanan dari 6 bulan ke 9 bulan dirasa tidak memenuhi hak-hak seorang tersangka. Karena dalam hal ini tersangka berhak untuk segera diproses ke tingkat selanjutnya yaitu penuntutan. Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara khusus dan kurang memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme. Pemerintah Indonesia perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan menyusun Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang pada 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan hukum pidana khusus. Hukum pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:³²

³¹ Yuni Ulfa Diayanti, dkk, *Implementasi Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamaju Sulawesi Barat*, Universitas Negeri Makasar, Hlm. 163.

³² Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm. 98.

- a. Pengaruh perkembangan zaman, merubah pola pandangan masyarakat. Dimana yang awalnya dianggap bukan sebagai tindak pidana. Karena perubahan pandangan dan norma dalam masyarakat, menjadi sebuah tindak pidana dan diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Hal tersebut dinamakan proses kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu dalam masyarakat.
- b. Undang-undang bersifat khusus diperlukan karena peraturan yang ada dianggap kurang atau tidak memadai lagi. Sedangkan untuk melakukan perubahan undang-undang yang telah ada, memerlukan waktu yang cukup lama.

Hukum Pidana Khusus, bukan hanya mengatur pidana materiilnya saja, akan tetapi juga mengatur hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan tersebut tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum KUHP bagi hukum pidana materiilnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan KUHP.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam KUHP maupun KUHP, serta tidak boleh melanggar sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia. Tetapi nyatanya yang terjadi Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 banyak pasal di dalamnya, yang masih tidak memenuhi hak-hak seorang tersangka.

Dalam Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4) bahwa “*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari, diperpanjang 60 hari dan 20 hari*”. Hal ini melanggar hak seorang tersangka yaitu peradilan yang bebas, cepat dan sederhana. Artinya tersangka mempunyai hak untuk segera diproses ke tingkat selanjutnya, yaitu penuntutan karena selama belum ada putusan pengadilan, maka seseorang belum bisa dikatakan secara sah melakukan sebuah tindak pidana (asas praduga tak bersalah).

Putusan No. 222/Pid.B/2006/PN.AB, tertanggal 15 Maret 2006 dengan terdakwa Rusli Amiludin alias Rusli, yang didakwa: Dakwaan Kesatu, Pasal 15 Jo Pasal 6; Dakwaan kedua Pasal 13 huruf c Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tuntutan dari Penuntut Umum yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara bersalah melakukan perbuatan yang *dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi*, dan menjatuhkan pidana penjara 7 tahun. Hakim menjatuhkan putusan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 13 huruf c dan dijatuhi pidana penjara 7 tahun.

Putusan No. 878/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar, tertanggal 4 Agustus 2011 dengan terdakwa Taufik bin Marzuki alias Abu Sayaf alias Alex Nurdin Sulaiman bin Tarmizi yang didakwa, dakwaan kesatu: Pasal 9 jo Pasal 15 dan dakwaan kedua: Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tuntutan dari Penuntut Umum yaitu terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 9 dan pidana penjara 8 tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana terorisme dan pidana penjara 5 tahun 6 bulan.

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak semuanya termasuk *Extra Ordinary Crime*, melainkan *Serious Crime*. Karena yang termasuk dalam *Extra Ordinary Crime*, diantaranya: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang disahkan oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Juli 1998, mengatur kualifikasi *Extra Ordinary Crime*, diantaranya:

a. Pasal 6 Genosida

Genosida artinya setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti diantaranya:

- 1) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- 2) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- 3) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

b. Pasal 7 Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan, berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis

yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

- 1) Pembunuhan
- 2) Pemusnahan
- 3) Perbudakan
- 4) Deportasi
- 5) Penyiksaan
- 6) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat.
- 7) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender
- 8) Penghilangan paksa
- 9) Kejahatan apartheid
- 10) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

c. Pasal 8 Kejahatan Perang

Yang termasuk kejahatan perang, diantaranya:

- 1) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi.
- 2) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini:
 - a) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;
 - b) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer;
 - c) **Menyerang atau membom, dengan sarana apa pun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer;**
 - d) Membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri;
 - e) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu, dan lain-lain.

Sedangkan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, mayoritas berupa penyertaan (*deelneming*). Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi juga ada yang dikarenakan

unsur paksaan. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.³³

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:³⁴

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Sedangkan klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, antara lain:

- a. Pembuat (*dader*), yang terdiri dari: Pasal 55
 - 1) Melakukan (*plegen*)
 - 2) Menyuruh melakukan (*doen plegen*)³⁵
 - 3) Turut serta melakukan (*medeplegen*)
 - 4) Menganjurkan melakukan (*uitlokken*)
- b. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) Pasal 56

Tentang pertanggungjawaban pembantuan diatur dalam Pasal 57 KUHP:

 - (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga;
 - (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
 - (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri;
 - (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

³³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 174.

³⁴ Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Hlm. 497-498.

³⁵ Eddy O. S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 359.

Oleh sebab itu, tidak semua kejahatan yang masuk dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme termasuk *extra ordinary crime*, melainkan *serious crime*, maka dari itu penulis mengklasifikasikan sebagai berikut:

No	Pengaturan	Keterangan
1	Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap seseorang secara meluas, menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa serta harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan/kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional.	<i>Extra Ordinary Crime</i>
2	Pasal 7	<i>Extra Ordinary Crime</i>
3	Pasal 8 Perbuatan menghancurkan atau merusak bangunan yang digunakan untuk kemananan lalu lintas udara, termasuk merusak pesawat udara.	<i>Extra Ordinary Crime</i>
4	Pasal 9 Perbuatan melawan hukum membawa masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan dan/atau mencoba menyerahkan, menguasai, dst senjata api, amunisi atau bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya.	<i>Serious Crime</i>
5	Pasal 10 A Perbuatan melawan hukum membawa masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan dan/atau mencoba menyerahkan, menguasai, dst senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya dan juga memperdagangkan	<i>Serious Crime</i>
6	Pasal 11 Pendanaan untuk melakukan tindak pidana terorisme	<i>Extra Ordinary Crime</i>
7	Pasal 12 A Setiap orang yang merencanakan, menggerakkan atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme di dalam maupun	<i>Extra Ordinary Crime</i>

	luar negeri Pasal 12 A Setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan dan/atau mengikuti pelatihan militer, dsb dengan maksud merencanakan, mempersiapkan dan/atau melakukan tindak pidana terorisme	
8	Pasal 13 A Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan menghasut orang atau kelompok untuk melakukan kekerasan	<i>Serious Crime</i>
9	Pasal 14 Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.	<i>Extra Ordinary Crime</i>
10	Pasal 15 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme	<i>Serious Crime</i>
11	Pasal 16 A Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak	<i>Extra Ordinary Crime</i>
12	Pasal 17 Korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme	<i>Extra Ordinary Crime</i>

Tabel 1. Pasal Tindak Pidana Terorisme

Penangkapan dan penahanan merupakan dari tindakan upaya paksa dimana pelaksanaannya dapat melanggar kebebasan bergerak sehingga diperlukan pengaturan untuk menghindari terjadinya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Untuk masa penahanan di tingkat penyidikan dalam perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 lebih tepat diterapkan dalam Pasal 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16 A dan 17. Sedangkan untuk tindak pidana terorisme yang merupakan penyertaan dalam hal pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10 A, 13 A dan 15 perlu dirumuskan lagi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Bahwa penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan, dilandasi dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam landasan filosofis, untuk mencapai cita hukum, maka perlu adanya pengaturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Landasan yuridis mengatakan, bahwa terdapat 6 Konvensi Internasional untuk mengakomodir tindak pidana terorisme. Selanjutnya landasan sosiologis, bahwa aksi terorisme sampai tahun 2019 selalu terjadi, dan hal tersebut telah meresahkan masyarakat. Bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas proporsionalitas, dimana peraturan menghendaki kepentingan masyarakat, negara, pelaku dan korban tindak pidana. Tetapi tidak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang hanya menghendaki kepentingan korban dan aparat penegak hukum saja.
- b. Penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan telah melanggar hak-hak seseorang sebagai tersangka. Dimana sesuai dengan Pasal Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor Kekuasaan Kehakiman, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebelum ada putusan hakim. Hal tersebut juga melanggar Pasal 4 ayat (2), yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam hal ini tersangka hak untuk segera diajukan ke tingkat selanjutnya (penuntutan) tidak terpenuhi. Selama 2014-2015 terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan penyidikan. Padahal dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/ 2000, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, ICCPR, Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur dengan jelas bahwa tidak boleh melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.
- c. *Extra Ordinary Crime* diantaranya: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Dalam

kejahatan terhadap kemanusiaan serangannya meluas dan sistematis. Oleh sebab itu tidak semua tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai *Extra Ordinary Crimes*. Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia mayoritas didominasi dengan tindak pidana pembantuan, yang ancaman pidananya di bawah 10 tahun.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dengan adanya penelitian hukum ini, Penulis berharap:

- a. Untuk Pemerintah, bahwa tindak pidana terorisme masih belum secara massif ditanggulangi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Untuk itu perlu dilakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terutama dalam masa penahanan di tingkat penyidikan. Karena pelaku merasa haknya dilanggar, sehingga hal tersebut membuat pelaku merasa tidak jera.
- b. Perlu dibuatkan pedoman untuk Kepolisian, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan Hakim terkait kualifikasi tindak pidana terorisme yang termasuk *Extra Ordinary Crime* dan *Serious Crime*. Sehingga dapat diketahui dalam penerapan masa penahanan di tingkat penyidikan, agar hak-hak sebagai tersangka terpenuhi.
- c. Untuk Kepolisian karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu dalam melakukan penyidikan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
- d. Perlu adanya monitoring dari suatu lembaga mengenai penyidikan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Sehingga nanti ada evaluasi, yang dapat dijadikan untuk kebaikan kedepannya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.
- e. Untuk masyarakat, agar menjaga dirinya untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang bersifat radikalisme. Begitu juga dalam mengikuti pelatihan-pelatihan militer yang belum jelas asal usulnya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Buku:

Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ali Masyhar, 2008, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Eddy O. S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Hamid Awaluddin, 2012, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Mulia.

Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Putra Abardin.

Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Adriyanto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Volume 2 Edisi 2, Tahun 2014.

Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai "Extraordinary Crime" Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Magister Hukum, Universitas Medan Area, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Volume 5 Nomor 5, Oktober 2017.

Danur Vilano, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017.

E. Nurhaini Butarbutar, *Asas Praduga Tidak Bersalah Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 No. 3, September 2011.

Edy Sunaryo Berutu, *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, Lex Crimen*, Volume VI Nomor 6, Agustus 2017.

Maulana Rahmat, *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 1 Nomor 2, September 2017.

Sefriani, *Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012)*, Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 2, Agustus 2013.

Yuni Ulfa Diayanti, dkk, *Implementasi Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamaju Sulawesi Barat*, Universitas Negeri Makasar.

Internet:

Margith Juita Damanik, *5 Kasus Teror di Indonesia Selama Mei 2018*, dalam <http://www.google.com>, IDN Times.

Tribun Medan, *Kesaksian Warga Bom Bunuh Diri Ibu dan Bayi 2 Tahun Suaranya Kuat Kali, Ini Kronologi Teror Sibolga*, dalam <http://wartakota.tribunnews.com>.

Wikipedia, *Terorisme di Indonesia*, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme diIndonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_diIndonesia).

